



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

djppr 

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Data Laporan Pelanggaran Tahun 2020 s.d. 2023





Data Pengaduan Pelanggaran Tahun 2020

No.		Keterangan
1	Jumlah Pengaduan	Pada tahun 2020, total terdapat 5 jumlah pengaduan masyarakat yang masuk melalui berbagai saluran pengaduan, yaitu SP4N-LAPOR! dan Wise Kemenkeu.
2	Jenis Pengaduan	Administratif: 5 Non Administratif: 0
3	Gambaran Umum	Seluruh pengaduan bersifat administratif dalam lingkup proses bisnis DJPPR. Seluruh pengaduan telah ditindaklanjuti dengan status tuntas
4	Laporan Penindakan	Tidak terdapat penindakan kepada pegawai karena laporan bersifat administratif



Data Pengaduan Pelanggaran Tahun 2021

No.		Keterangan
1	Jumlah Pengaduan	Pada tahun 2021, total terdapat 8 jumlah pengaduan masyarakat yang masuk melalui berbagai saluran pengaduan, yaitu SP4N-LAPOR!, Wise Kemenkeu dan email uki-djppr@kemenkeu.go.id.
2	Jenis Pengaduan	Administratif: 6 Non Administratif: 2
3	Gambaran Umum	Sebagian pengaduan bersifat administratif dalam lingkup proses bisnis DJPPR (6 dari 8). Sementara pelanggaran bersifat non-administrative seperti <i>fraud</i> , pelanggaran kode etik dan disiplin ada 2 dari 8. Seluruh pengaduan telah ditindaklanjuti dengan status tuntas
4	Laporan Penindakan	Dari 2 pengaduan yang terkait dugaan pelanggaran non-administratif telah dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan. Namun, tidak ada yang terbukti melakukan pelanggaran oleh pegawai DJPPR



Data Pengaduan Pelanggaran Tahun 2022

No.		Keterangan
1	Jumlah Pengaduan	Pada tahun 2022, total terdapat 7 jumlah pengaduan masyarakat yang masuk melalui berbagai saluran pengaduan, yaitu Wise Kemenkeu dan Kanal SAPA DJPPR
2	Jenis Pengaduan	Administratif: 0 Non Administratif: 7
3	Gambaran Umum	Seluruh pelanggaran bersifat non-administratif seperti <i>fraud</i> , pelanggaran kode etik dan disiplin total 7 laporan. Seluruh pengaduan telah ditindaklanjuti dengan status tuntas
4	Laporan Penindakan	<ul style="list-style-type: none">• 5 dari 7 pengaduan yang terkait dugaan pelanggaran non-administratif telah dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan. Namun, tidak ada yang terbukti melakukan pelanggaran oleh pegawai DJPPR• 2 dari 7 pengaduan yang terkait dugaan pelanggaran non-administratif telah dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan. Dari hasil pemeriksaan, pegawai ybs terbukti melakukan pelanggaran dan telah dilakukan proses penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku



Data Pengaduan Pelanggaran Tahun 2023

No.		Keterangan
1	Jumlah Pengaduan	Pada tahun 2023, total terdapat 3 jumlah pengaduan masyarakat yang masuk melalui berbagai saluran pengaduan, yaitu SP4N-LAPOR dan Wise Kemenkeu
2	Jenis Pengaduan	Administratif: 0 Non Administratif: 3
3	Gambaran Umum	Seluruh pelanggaran bersifat non-administratif seperti <i>fraud</i> , pelanggaran kode etik dan disiplin total 3 laporan. Seluruh pengaduan telah ditindaklanjuti dengan status tuntas
4	Laporan Penindakan	<ul style="list-style-type: none">• 2 dari 3 pengaduan yang terkait dugaan pelanggaran non-administratif telah dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan. Namun, tidak ada yang terbukti melakukan pelanggaran oleh pegawai DJPPR• 1 dari 3 pengaduan yang terkait dugaan pelanggaran non-administratif telah dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan. Dari hasil pemeriksaan, pegawai ybs terbukti melakukan pelanggaran dan telah dilakukan proses penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku